

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Riview Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fathia & Indriani, 2022) mengenai Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai Pemoderasi. Peneliti mengambil populasi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan responden yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan dan operator sistem keuangan desa yang berasal dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan melalui google form kepada responden pada bulan Februari sampai Mei 2021. Metode analisis yang digunakan adalah PLS-SEM dengan menggunakan aplikasi WarpPLS versi 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia Rahmi et al., 2022) mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Desa Karang Sentosa. Penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah membawa perubahan yang akuntabel. Namun demikian, pengelolaan keuangan desa tetap memerlukan pengawasan dari seluruh jajaran desa, agar dapat berperan dengan baik dalam menjaga pengelolaan keuangan desa dan mencegah terjadinya kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kisnawati et al., 2019) mengenai Pengendalian Intern dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. Peneliti mengambil populasi di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri

dari 10 Desa. Sampel dikumpulkan sebanyak 10 responden dengan sekretaris desa sebagai responden yang diambil dari masing-masing desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Anggoe & Reskino, 2023) mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Sampel penelitian terdiri dari 100 pegawai pada bank BUMN yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem whistleblowing, komitmen organisasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan moralitas individu mampu memoderasi pengaruh antara pengendalian internal, sistem whistleblowing, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

B. Landasan Teori

1. Teori *Fraud Hexagon*

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, seperti teori *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2016, ini merupakan pengembangan selanjutnya dari teori *fraud triangle* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953. Selain itu ada juga teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004, serta teori *fraud pentagon* yang diajukan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. Menurut Georgios L. Vousinas (2016), teori *fraud* ini melibatkan enam elemen. Keenam aspek dalam konsep *fraud hexagon* meliputi:

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang mungkin dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk kebutuhan keuangan yang mendesak, pengurangan tujuan keuangan yang diantisipasi, tekanan keuangan dalam keluarga, dan lain-lain. Hal

tersebut sering kali memicu pelaku criminal seperti berani dalam melakukan tindakan seperti pencurian kas perusahaan.

2) Kapabilitas (*Capability*)

Hal ini menunjukkan sejauh mana kemampuan dan potensi kecurangan suatu pihak dalam lingkungan bisnis. Saat ini, contoh yang jelas dari hal ini adalah ketika ada perubahan direksi, yang menimbulkan konflik kepentingan.

3) Kesempatan (*Opportunity*)

Pengawasan yang lemah mendorong seseorang untuk bertindak dalam kecurangan ketika ada celah dalam pengendalian internal perusahaan. Ketika seseorang memanfaatkan celah ini dan mengeksploitasi kelemahan operasional dalam pengendalian internal, konsekuensinya bisa berakibat fatal bagi perusahaan.

4) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pada poin tersebut, pelaku akan membenarkan tindakan mereka atau percaya bahwa mereka dibenarkan dalam melakukan kecurangan. Ini adalah hasil dari seseorang yang percaya bahwa mereka telah berkontribusi lebih banyak kepada perusahaan daripada yang mereka miliki, yang mendorong mereka untuk mengambil keuntungan dari situasi karena mereka percaya itu dapat diterima selama mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

5) Ego (*Arrogance*)

Sikap tinggi hati yang dikenal sebagai arogan melahirkan keserakahan pada mereka yang berpikir bahwa mereka dibebaskan dari kontrol internal. Ini terjadi ketika satu orang menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain.

6) Kolusi (*Collusion*)

Menurut Georgios L. Vousinas (2019) kolusi adalah istilah untuk pengaturan di mana dua pihak atau lebih menipu satu sama lain agar satu pihak dapat mengambil tindakan lain dengan maksud mencapai hasil yang tidak diinginkan, seperti merampas hak pihak ketiga.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Dalam dua puluh tahun terakhir, berbagi keinginan dan tindakan telah diteliti menggunakan teori tindakan beralasan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), yang kemudian diperbarui oleh Ajzen (1991) ke teori perilaku terencana. Teori tindakan beralasan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu mempengaruhi perilaku mereka. Variabel independen, seperti sikap dan norma subjektif, mengendalikan faktor-faktor ini. Teori perilaku terencana ini merupakan evolusi dari teori tindakan rasional. Teori ini mengandung elemen tambahan untuk kontrol perilaku dalam bentuk persepsi. Menurut teori Ajzen, sikap terhadap perilaku menunjukkan bagaimana seseorang memandang tindakan tertentu sebagai baik atau buruk. Namun, baik TRA dan TPB mengklaim bahwa niat adalah prediktor utama perilaku individu, yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) Sikap (*Attitude*)

Sikap (*Attitude*) yaitu mencakup penilaian individu terhadap apakah perilaku tersebut dianggap baik atau buruk, positif atau negatif.

2) Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma Subjektif (*Subjective Norms*) merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan dari orang-orang di sekitarnya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku tertentu.

3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*)

Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*) merujuk pada keyakinan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas perilaku yang dimaksud. Faktor ini mencakup kendali internal (kemampuan, keterampilan) dan kendali eksternal (faktor-faktor lingkungan).

3. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Fraud adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan individu (Tuanakotta, 2013). Pendekatan *fraud triangle* dapat digunakan dalam deteksi *fraud*. Segitiga penipuan

mengatakan bahwa tiga faktor berkontribusi terhadap kecurangan yaitu tekanan, peluang, dan rasionalitas.

Tekanan yang diberikan pada seseorang dapat meningkatkan kemungkinan penipuan. Gaya hidup, tuntutan keuangan, profesionalisme, dapat memberikan tekanan ini. Dalam hal ini, tekanan ekonomi adalah yang paling umum, karena seseorang membutuhkan uang. Faktor berikutnya adalah adanya peluang atau kesempatan. Perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang buruk dan tingkat keamanan yang rendah sering menjadi korban penipuan. Rasionalisasi adalah faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kecurangan. Dimana rasionalisasi adalah sikap atau esensi seseorang yang membenarkan praktik penipuan. Seseorang yang terbiasa tidak jujur lebih cenderung merasionalisasi kecurangan. Saat melakukan kecurangan, pelaku akan selalu berusaha mencari alasan rasional untuk membenarkan perbuatannya (Fathia & Indriani, 2022a).

4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Ini juga merupakan sarana untuk mengukur pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem keuangan desa diyakini mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi fungsi operasional (Gelinis & Dull, 2008).

(Sulina et al., 2017) aplikasi siskeudes dapat mengelola keuangan desa dengan lebih baik. Tujuan penggunaan aplikasi siskeudes adalah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan mudah, serta sebagai sarana pengendalian atau pengukuran pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara metode lama dan Siskeudes adalah bahwa sistem kerja sebelumnya dilakukan secara manual

dan masih terpisah dalam laporan. Meskipun karya Siskeude telah menghasilkan banyak laporan, ia masih membuat lebih dari satu masukan dalam catatan. Meskipun ada metode baru, desa masih menggunakan yang lama karena data dimasukkan ke dalam sistem dilakukan secara manual, karena untuk menyelesaikan kesalahan yang mungkin terjadi.

(Pratiwi & Pravasanti, 2020) seseorang yang tertarik dengan teknologi terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pendampingan dan mencoba berpartisipasi dalam dukungan teknologi kolaboratif. Hal ini mirip dengan pengguna aplikasi Siskeudes, difasilitasi oleh kegiatan pembinaan yang difasilitasi dengan dukungan untuk memahami waktu untuk menjalankan aplikasi. Azmy & Harry (2017) menemukan bahwa Sistem Keuangan Desa memiliki beberapa indikator yaitu :

- 1) Relevan, yakni menekan suatu ketidakjelasan, menaikkan tingkat pengmabilan keputusan, atau dengan cara melakukan koreksi terhadap ekspektasi yang ada sebelumnya.
- 2) Andal, yakni bebvas dari kesalahan atau bias secara akurat mewakili aktivitas organisasi.
- 3) Lengkap, yaitu tidak menghapus unsur utama dari peristiwa atau kegiatan yang diukur.
- 4) Tepat waktu, yakni menyediakan informasi sesuai dengan target waktu.
- 5) Bisa dimengerti, yaitu penyajian berbentuk format yang berguna serta mudah dipahami.
- 6) Bisa diverifikasi, yakni mudah dalam mendapatkan informasi yang dapat diverifikasi secara langsung ke bukti asal.
- 7) Dapat diakses, pengguna dapat mengakses sistem kapan saja ketika dibutuhkan dalam format yang digunakan.

5. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah suatu rencana organisasi dan metode yang dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi asset, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki

efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Mufidah & Masnun, 2021). Menurut COSO terdapat lima indikator dalam sistem pengendalian internal, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring.

6. Moralitas

Moralitas merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas yang ada pada tindakan manusia yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan baik atau tindakan tersebut termasuk buruk atau tidak baik. Moralitas meliputi pemahaman terkait tindakan yang bernilai baik atau bahkan tindakan yang bernilai buruk yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang memiliki moral yaitu jika berperilaku menurut aturan yang diberlakukan di masyarakat yang mana memiliki sikap dan perilaku yang baik (Umam, 2010; Udayani & Sari, 2017).

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dengan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan sistem keuangan desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Aplikasi SISKEUDES sedang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola keuangan desa. Berdasarkan *fraud* hexagon dengan adanya sistem keuangan desa adalah cara bagi pemerintah desa untuk menunjukkan transparansinya kepada masyarakat dengan memberikan informasi keuangan. Dalam hal ini, masyarakat dan Pemerintah Pusat bertindak sebagai pihak utama, dan Pemerintah Daerah yang dipercaya mengelola keuangan desa. Agar tidak adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa maka diperlukan transparansi.

(Latrini & Gayatri, 2018) mengklaim bahwa *fraud* dapat dihindari dengan menggunakan aplikasi sistem Siskeudes sebagai kemajuan teknologi. Menurut hasil penelitian (Arfiansyah, 2020) akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh moralitas individu 37 Siskeudes. Pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat karena akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa, dan dengan adanya kepercayaan ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dana desa. (Arfiansyah, 2020) akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercaya sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa untuk mencapai tujuan desa. Penelitian ini didukung oleh (Laksmi & Sujana, 2019), (Saputra, Koswara, & Atmadja, 2017), dan (Sofia & Amola, 2017).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki kemampuan untuk mencegah *fraud* karena telah membuat pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dengan menggunakan komputersasi di tempat-tempat yang sebelumnya dilakukan secara manual. Akibatnya bisa meminimalisir tindakan kecurangan, dengan membuat pelaporan keuangan lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya. Untuk mencegah kecurangan, pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes yang tepat dan akurat akan membuat pengelolaan dana desa lebih akuntabel.

H1: Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal adalah lembaga atau organisasi berfungsi sebagai sarana pemantauan, pengarahan, dan penilaian sumber dayanya. Ini juga memainkan peran penting dalam deteksi dan pencegahan penipuan. Untuk memastikan bahwa laporan informasi keuangan disediakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas (Wardani & Andriyani,

2017). Sistem pengendalian internal memungkinkan untuk mengawasi, memantau, dan mengidentifikasi contoh penyelewengan dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga memungkinkan pembukuan laporan yang tepat.

(Carpenter & Reimers 2005) mengklaim bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan tindakan yang berkaitan dengan rencana, seperti rencana atau niat untuk melakukan kecurangan yang bermanifestasi sebagai posisi untuk melakukan kecurangan dalam pengendalian internal atau penyalahgunaan tugas. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada peluang (*oportunity*) bagi karyawan untuk melakukan kecurangan karena sistem pengendalian internal organisasi yang lemah. Kesempatan seseorang untuk melakukan *fraud* akan dihilangkan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Niat karyawan untuk melakukan kecurangan menurun dengan tingkat pengendalian internal organisasi.

Penelitian (Megawati dan Reskino 2023) menjelaskan bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Untuk mencegah kecurangan, pengendalian internal secara aktif terlibat dalam mengatur dan mengawasi pemerintah daerah saat mereka melaksanakan tugas manajemen yang efektif dan efisien.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Oleh Moralitas

Moralitas merupakan aspek mendasar yang menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang. (Setiawan, 2018) menegaskan bahwa tindakan individu adalah cerminan dari tingkat penalaran moral mereka. Ketika dihadapkan dengan kebingungan moral, orang-orang dengan berbagai tingkat kemampuan penalaran akan bereaksi berbeda satu sama lain. Sistem keuangan desa memperhitungkan pengendalian internal.

Menurut penelitian (Puspasari & Suwardi, 2012), orang dengan karakter moral yang kuat dan sistem pengendalian internal yang efektif lebih cenderung menahan diri dari tindakan kecurangan, bahkan mampu untuk mencegah kecurangan (*fraud*).

Hasil Penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) menunjukkan bahwa moralitas dapat memoderasi sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena didukung oleh sistem pengendalian internal yang solid. Berdasarkan hasil penelitian ((Puspasari & Suwardi, 2012), (Atmadja & Saputra, 2017), penulis dapat menduga bahwa menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada setiap aparatur desa yang menjalankan sistem keuangan desa mengarahkan mereka untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan jujur, yang dapat mencegah kecurangan.

Berdasarkan *fraud hexagon*, yang mencakup moralitas dalam ego (mementingkan diri sendiri). Tetapi perbaikan moral dapat mencegah asumsi seperti itu. Ketika orang memiliki moral yang tinggi, kemungkinan melakukan kecurangan rendah, karena mereka tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi mereka, tetapi juga untuk kepentingan publik. Semakin tinggi moral seseorang, semakin mereka berusaha menghindari tindakan kecurangan (*fraud*).

H3: Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

4. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi

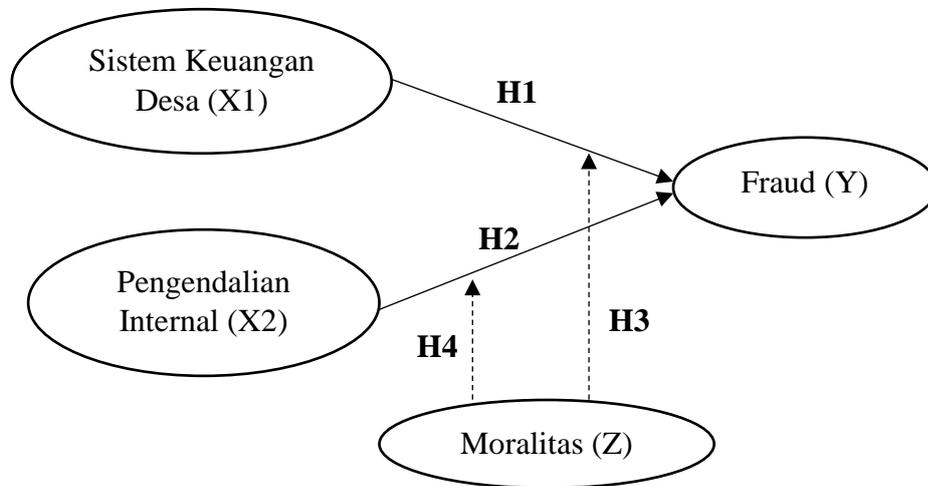
Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal dengan benar sehingga dapat menghentikan semua tindakan kecurangan. Ketika sistem pengendalian internal didukung oleh sikap dan budaya pribadi yang positif, atau sering disebut sebagai moralitas, maka sistem tersebut berjalan dengan baik (Purwitasari, 2013). Mendorong, menjaga dan memelihara mental

karyawan agar selalu jujur, disiplin, loyal, etis, dan berkomitmen membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dapat membantu memerangi *fraud* (efektif (STAN, 2007) dalam (Taufik, 2011).

Teori *fraud hexagon* menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena enam unsur, yaitu tekanan, kemampuan, peluang, rasionalisasi, ego, dan kolusi. Moral anggota organisasi dapat mempengaruhi pengendalian internal yang dilakukan oleh karyawan dan manajer. Kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan keinginan kuat untuk melindungi aset adalah tanda-tanda moral karyawan (Megawati & Reskino, 2023). Dalam arti lain, moralitas individu dapat membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif yang mengurangi risiko kecurangan.

Menurut (Usman, 2015), selain sistem pengendalian internal pemerintah, kecurangan akan terjadi jika pejabat menyalahgunakan kekuasaannya atau memiliki moral yang buruk. Menurut (Atmadja & Saputra, 2017), moralitas mampu memoderasi (Atmadja & Saputra, 2017) menyatakan bahwa moralitas berhasil memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan bahwa untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, moral yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat.

H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variable moderasi.

D. Model Penelitian Empiris**Gambar 2. 1 Model Penelitian Empiris**